



## Perspektif Soekarno dalam Kaitannya dengan Teori Kewarganegaraan Republikan dan Komunitarian

Ade Sopyan Hadi 

Yogyakarta State University

### Info Artikel

*Sejarah Artikel:*  
 Disubmit: Januari 2024  
 Direvisi: Maret 2024  
 Diterima: April 2024

*Keywords:*  
*Citizenship; Republican, Communitarian; Soekarno*

### Abstrak

Soekarno merupakan tokoh terkenal spektakuler, dalam berpidato Soekarno membawakannya dengan berapi-api seperti pada sidang pertama BPUPKI. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan mengenai perspektif Soekarno dalam kaitannya dengan teori kewarganegaraan republikan dan komunitarian. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif. Sedangkan, jenis penelitiannya yaitu studi kepustakaan yang memiliki makna sebagai suatu jenis penelitian melalui proses pengumpulan data seperti buku-buku, dokumen, artikel, dan lain sebagainya. Hasil Penelitian ini menunjukkan perspektif Soekarno dalam kaitannya dengan teori kewarganegaraan republikan dapat dilihat ketika Soekarno menyampaikan konsep mengenai negara sedangkan perspektif Soekarno dalam kaitannya dengan teori kewarganegaraan republikan dapat dilihat ketika Soekarno mengatakan bahwa sosionasionalisme merupakan nasionalisme Indonesia. Adapun kesimpulannya yaitu dalam menyampaikan berbagai pidatonya Soekarno dapat dikatakan sebagai tokoh yang memiliki jiwa seorang republikan dan komunitarian.

### Abstract

*Soekarno was a spectacular famous figure, in his speech Soekarno delivered it with as much fire as at the first BPUPKI session. The aim of this research is to describe Soekarno's perspective in relation to republican and communitarian citizenship theories. The approach used is a qualitative approach. Meanwhile, the type of research is library study which has meaning as a type of research through the process of collecting data such as books, documents, articles, and so on. The results of this research show that Soekarno's perspective in relation to republican citizenship theory can be seen when Soekarno conveys the concept of the state, while Soekarno's perspective in relation to republican citizenship theory can be seen when Soekarno says that sociationalism is Indonesian nationalism. The conclusion is that in delivering his various speeches Seokarno can be said to be a figure who has the soul of a republican and communitarian.*

© 2024 Universitas Negeri Semarang

 Alamat korespondensi:  
 Jl. Colombo Yogyakarta No.1, Karang Malang, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281  
 E-mail: [adesopyan.2022@student.uny.ac.id](mailto:adesopyan.2022@student.uny.ac.id)

ISSN 2252-7133  
 E-ISSN 2548-4648

Ir. Soekarno atau yang dikenal juga dengan nama Bung Karno merupakan tokoh terkenal yang spektakuler dan juga presiden pertama Republik Indonesia. Soekarno memiliki relasi yang luas dengan tokoh-tokoh dunia, pengetahuan yang sifatnya luas termasuk dalam konsep ideologi maupun berbangsa dan bernegara, serta merupakan tokoh yang sangat lantang dalam membela bangsa dan negara Indonesia dari tangan penjajah.

Dalam berpidato, Soekarno tentunya membawakan naskah pidato yang ada dengan semangat yang berapi-api sehingga seringkali membuat orang-orang terpukau bahkan sampai saat ini jika masih mendengar pidato Soekarno masih memiliki rasa yang kagum terhadap pembawaannya serta kharismanya. Ketika berpidato, disamping memiliki kharisma yang tinggi Soekarno juga menyampaikan isi-isu pidato yang cemerlang. Ketika Indonesia belum merdeka maupun pada saat Indonesia sudah merdeka Soekarno telah banyak menyampaikan pidato-pidato yang berkaitan dengan bangsa dan negara Indonesia. Salah satu pidato yang terkenal yaitu pidato pada saat sidang pertama BPUPKI di mana pada saat itu Soekarno menyampaikan gagasan mengenai Pancasila yang akan dijadikan ideologi dalam berbangsa dan bernegara (Soemohadiwidjojo, 2017).

Pada suatu malam ketika menjelang tanggal 1 Juni Tahun 1945, Soekarno berbincang dengan K.H Masjkur, Wahid Hasyim, Kahar Mudzakir dan Yamin. Hasil dari perbincangan tersebut sejak awal digagas nilai yang berkaitan dengan ketuhanan dimasukkan ke dalam dasar negara Indonesia. Soekarno dalam Hidayat (2018) mengatakan bahwa orang Indonesia pada zaman dulu sudah tertarik mengenai konsep Tuhan, tetapi pada zaman dahulu orang Indonesia belum mengetahui di mana serta siapa Tuhan itu. Pada zaman dahulu orang Indonesia pergi ke pohon besar maupun batu besar yang bertujuan mencari Tuhan. Jadi dapat dikatakan bahwa bangsa kita sejak dahulu sudah ketuhanan. Kalau bangsa Indonesia merupakan bangsa yang berketuhanan sejak dahulu maka tulislah ketuhanan.

Berdasarkan paparan uraian latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan secara konkret mengenai perspektif pemikiran Soekarno dalam kaitannya dengan teori kewarganegaraan republikan dan perspektif pemikiran Soekarno dalam kaitannya dengan teori kewarganegaraan komunitarian. Selain itu konsep gagasan-gagasan yang telah dibuat oleh Soekarno juga memiliki relevansi dengan pendidikan kewarganegaraan serta materi-materi yang berkaitan dengan teori kewarganegaraan jumlahnya masih terbatas, oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti lebih mendalam mengenai perspektif pemikiran Soekarno dalam kaitannya dengan teori kewarganegaraan republikan dan komunitarian.

## METODE

Pendekatan yang digunakan pada penelitian perspektif Soekarno dalam kaitannya dengan teori kewarganegaraan republikan dan komunitarian tersebut yaitu pendekatan kualitatif. Pendekatan ini maksudnya yaitu proses pengumpulan data pada latar alamiah dengan tujuan menafsirkan fenomena sebagai instrumen kunci Rama dalam Mania (2019). Alasan digunakannya pendekatan kualitatif ini yaitu agar didapatkan data yang konkret mengenai perspektif pemikiran Soekarno dalam kaitannya dengan teori kewarganegaraan republikan dan komunitarian sehingga tujuan pada penelitian ini dapat terwujud.

Pada penelitian pemikiran Soekarno dan kaitannya dengan teori kewarganegaraan republikan dan komunitarian ini, jenis penelitian yang diterapkan yaitu jenis studi kepustakaan. Studi kepustakaan berarti jenis penelitian melalui pengumpulan berbagai data seperti buku, majalah, maupun yang lain (Saputri & Nuryono, 2018). Sedangkan, pada penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari hasil observasi maupun hasil dari dokumentasi yang sudah peneliti lakukan ketika melakukan penelitian yang telah diuraikan pada suatu penelitian (Zed, 2004).

## PEMBAHASAN

### Perspektif Soekarno dalam Kaitannya dengan Teori Kewarganegaraan Republikan

#### 1. Konsep Negara Menurut Perspektif Soekarno dalam Kaitannya dengan Teori Kewarganegaraan Republikan

Soekarno dalam Danardono (2021) pada saat sidang BPUPKI tanggal 1 Juni Tahun 1945 pernah menyampaikan pandangannya mengenai bagaimana filosofi maupun dasar-dasar yang menjadi pondasi pendirian Negara Kesatuan republik Indonesia yang dapat menjadi suatu negara yang merdeka, berdaulat adil dan makmur, pidato ini juga menjadi tonggak kelahiran Pancasila. Pancasila menjadi ide yang cemerlang dari Soekarno yang akan terus melengkapi jiwa-jiwa nasionalisme bangsa Indonesia. Intisari dari hal tersebut yaitu dikatakan bahwa suatu negara yang hendak dibangun juga hendaklah merupakan suatu "*National Staat*" yang berarti bahwa hal tersebut mengilhami negara nasional bukan negara yang sifatnya lebih mengerucut seperti negara yang dibangun berdasarkan suatu agama maupun suatu bentuk kedaerahan tertentu. Soekarno juga pernah memaparkan pidato yang mengatakan bahwa dapat saya katakan yang menjadi dasar awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu dasar kebangsaan atau *nationale staat*.

Soekarno memiliki kesadaran yang sifatnya empirik tentang negara Indonesia bagaimana suatu negara tersebut dapat dibangun diatas keberagaman yang begitu banyak entah itu keragaman dalam suku, keragaman dalam agama, keragaman dalam bahasa, keragaman dalam ras, maupun keragaman dalam aspek politik pada bangsa Indonesia yang muncul sejak zaman dahulu.

Pancasila adalah ideologi negara yang dijadikan pedoman dalam proses penyelenggaraan negara. Para pendiri negara yang menjadi pencetus Pancasila yaitu Mohammad Yamin, Mr. Soepomo serta Ir. Soekarno. Perumusan Pancasila tersebut dilakukan pada saat sidang badan penyelidik usaha persiapan kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang pertama sehingga hal tersebut

menjadi tonggak awal kelahiran Pancasila. Dalam proses perumusan dasar negara ini terdapat berbagai pandangan antar berbagai golongan seperti golongan nasionalis, agamis dan golongan komunis. Setelah itu, dasar negara yang diusulkan oleh Soekarno yang terdiri dari lima prinsip diusulkan untuk dibuat nama dengan nama Pancasila. Penamaan Pancasila tersebut juga berasal dari usulan nama teman Soekarno yang merupakan seorang yang ahli dalam bahasa (Hasanah & Aan Budianto, 2020).

Konsep dari Soekarno mengenai bagaimana konsep pendirian negara Indonesia maupun gagasan mengenai Pancasila sebagai dasar berbangsa dan bernegara Indonesia tersebut harus bersifat *nasional staat* yang berarti bahwa hal tersebut mengilhami negara nasional bukan negara yang sifatnya lebih mengerucut seperti negara yang dibangun berdasarkan suatu agama maupun suatu bentuk kedaerahan tertentu sifatnya sangat baik bagi kehidupan politik maupun berbangsa pada negara Indonesia. Selain itu, gagasan Soekarno mengenai dasar ideologi Pancasila yang terdiri dari lima prinsip pada saat melakukan sidang BPUPKI tersebut sangat berguna bagi kehidupan politik saat ini sehingga Indonesia bisa berdiri dengan kokoh diatas keberagaman sampai saat ini berkat adanya Pancasila yang menjadi kesepakatan para pendiri negara terdahulu.

Berdasarkan konsep negara yang harus didirikan diatas keberagaman dan usulan ideologi Pancasila dari Soekarno tersebut telah berdampak positif terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka, hal tersebut selaras dengan teori kewarganegaraan republikan yang ada mengatakan bahwa teori kewarganegaraan republikan melihat tiap-tiap individu sebagai orang yang mempunyai potensi yang sifatnya positif atau baik terhadap perjalanan politik suatu bangsa (Shachar, 2017). Oleh karena itu, kita sepatutnya terus memiliki kesadaran dan perjuangan dalam menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut tentu dapat terwujud apabila kita bisa menjalankan pancasila sebagai pedoman berbangsa dan bernegara dengan baik.

## 2. Konsep Nasionalisme Menurut Perspektif Soekarno dalam Kaitannya dengan Teori Kewarganegaraan Republikan

Soekarno dalam Octavian dan Dianti (2023) mengatakan bahwa sosinationalisme yang dianut oleh bangsa Indonesia merupakan nasionalisme yang memiliki khas sendiri yang tentunya memegang erat nilai-nilai kemanusiaan demi keberlanjutan hidup umat manusia. Hal tersebut maksudnya yaitu landasan nasionalisme yang dimaksudkan oleh Soekarno yaitu nasionalisme berperikemanusiaan. Soekarno juga pernah menyampaikan suatu pidato yang berisi bahwa nasionalisme yang dipegang oleh bangsa Indonesia yaitu nasionalisme kemanusiaan bukan seperti nasionalisme yang bernama *chauvinisme* yang menganggap bangsanya lebih mampu dan lebih kuat dari berbagai hal sehingga sering mengabaikan kemanusiaan. Oleh karena itu dapat diketahui bahwa sosinationalisme yang dipercayai Soekarno memiliki kesamaan dengan prinsip humanisme sehingga sejauh ini apabila nasionalisme Soekarno dikatakan sebagai fasisme tentu hal tersebut tidak sesuai.

Berdasarkan hal diatas dapat diketahui bahwa nasionalisme menurut Soekarno merupakan nasionalisme yang memegang tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan menentang keras adanya penindasan bangsa terhadap bangsa lain yang seringkali menganggap dirinya lebih hebat dari bangsa lain sehingga hal tersebut dapat berbahaya bagi perdamaian dunia.

Pemikiran Soekarno dalam berpolitik tentang keberanian mengambil sikap maupun gagasan pada zaman dulu merupakan salah satu ciri dari warga negara republikan yaitu salah satunya masyarakat yang ada akan menjadi aktor politik. Hal tersebut selaras dengan yang dikemukakan oleh Effendi (2018) bahwa dalam teori kewarganegaraan republikan terdapat makna yaitu masyarakat yang ada yang merupakan bagian dari suatu komunitas politik tertentu adalah pusat dari kehidupan politik. Teori kewarganegaraan republikan juga memfokuskan pada ikatan-ikatan yang melekat serta kewajiban tiap-tiap warga negara terhadap kemajuan dan perkembangan negaranya.

## Perspektif Soekarno dalam Kaitannya dengan Teori Kewarganegaraan Komunitarian

### 1. Konsep Marhaenisme Menurut Perspektif Soekarno dalam Kaitannya dengan Teori Kewarganegaraan Republikan

Pada konferensi di kota Mataram presiden pertama Republik Indonesia dan tokoh besar revolusi Indonesia Soekarno (2015) mengungkapkan bahwa Partindo yang ada sudah mengambil suatu keputusan yang berusaha untuk memperkokoh keberadaan kaum marhaen dan ajaran mengenai marhaenisme itu sendiri yang perincinya yaitu sebagai berikut:

- a. Marhaenisme, dikatakan sebagai suatu nasionalisme dan sosio demokrasi yang ada pada bangsa Indonesia
- b. Yang dikatakan marhaen adalah para kaum proletar yang ada di Indonesia, kaum tani yang ada di Indonesia yang kehidupannya menjadi melarat
- c. Dalam praktiknya partindo menggunakan perkataan marhaen dan tidak menggunakan perkataan proletar dikarenakan perkataan proletar tersebut telah tercantum dalam sendi-sendi marhaenisme. Oleh karena itu kaum proletar juga dapat dikatakan sebagai kaum petani yang juga memiliki kehidupan yang melarat.
- d. Partindo berkeyakinan bahwa dalam semangat perjuangan dimana kaum melarat yang ada pada bangsa Indonesia harus menjadi bagian-bagian perjuangan tersebut.
- e. Dalam perjuangan yang ada maka kaum marhaen sangat yakin bahwa kaum proletar sangat penting dalam perjuangan yang ada.
- f. Marhaenisme dapat dikatakan sebagai asas yang dimana didalamnya menghendaki segala susunan masyarakat Indonesia maupun negara Indonesia untuk menyelamatkan segala kaum marhaen
- g. Marhaenisme juga dikatakan sebagai suatu cara perjuangan yang dilakukan untuk mencapai segala susunan masyarakat Indonesia maupun mencapai susunan negara Indonesia oleh rakyat yang ada melalui cara-cara yang bersifat revolusioner.

Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud marhaenisme adalah suatu cara perjuangan didalamnya terdapat upaya-upaya untuk melawan berbagai paham seperti paham kapitalisme maupun paham imperialisme. Marhaenisme dikatakan sebagai setiap orang atau setiap bangsa Indonesia yang percaya dan menjalankan paham marhaen tersebut. Sembilan kalimat dari putusan yang ada sebenarnya sudah sangat jelas dalam menjelaskan bagaimana konsep marhaen maupun marhaenisme itu sendiri.

Kalimat yang ada di atas tersebut juga sangat membuktikan bahwa bagaimana cara perjuangan yang ada tersebut sifatnya tidak boleh melamun, cara perjuangan yang dikatakan Soekarno harus bersifat orisinal, cara perjuangan yang berdasarkan fakta-fakta yang nyata terjadi, cara perjuangan yang modern dan terkini. Oleh karena itu apa yang dikatakan dalam perkataan tersebut telah menjadi landasan para kaum marhaen dan kaum proletar untuk bertindak dalam menanggapi masalah bangsa. Dalam penjelasan tersebut juga dapat diambil makna bahwa marhaen itu sendiri bukan hanya terdiri dari kaum proletar saja namun juga terdiri dari kaum tani yang mlarat serta kaum mlarat lainnya yang ada di negara ini seperti pedagang kecil, kaum yang ngarit rumput, kaum gerobak, para nelayan, maupun kaum-kaum lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semangat Soekarno dalam memperjuangkan kaum mlarat seperti petani, nelayan, pedagang asongan maupun yang lainnya serta ajakan gotong royong antara kaum marhaen dan proletar lainnya dalam memperjuangkan kesejahteraan yang sudah dipaparkan di atas tentu berkaitan dengan teori kewarganegaraan komunitarian. Teori komunitarian mengatakan bahwa teori kewarganegaraan komunitarian menekankan urgensi kebersamaan atau gotong royong dalam mengatasi berbagai hambatan dan tantangan yang dihadapi suatu bangsa, berbasis kesadaran dan kesukarelaan, untuk kepentingan bersama, sosial atau nasional. Model kewarganegaraan komunitarian, dikembangkan oleh Etzioni, dengan berbasiskan realitas kebangsaan

Amerika Serikat yang timpang dengan *konsensus* kebangsaannya, akibat individualisme dan intoleransi, maka model komunitarianisme adalah alternatif tradisi kewarganegaraan untuk mengatasi realitas itu, yang mengutamakan persatuan dan keseimbangan hak juga kewajiban (Nurvenayanti, 2016).

## 2. Konsep Persatuan Menurut perspektif Soekarno dalam Kaitannya Dengan Teori Kewarganegaraan Republikan

Menurut Soekarno dalam Mulyawan et al., (2021) kekayaan dan keberagaman etnis yang dimiliki bangsa Indonesia adalah anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa yang bernilai tinggi. Sejak zaman dahulu seperti pada prakemerdekaan berbagai upaya untuk menghilangkan rasa kedaerahan yang bersifat berlebihan terus dilakukan. Hal tersebut misalnya pada saat kongres sumpah pemuda yang mengikrarkan untuk menyatukan perbedaan yang dimiliki bangsa Indonesia menjadi satu kesatuan yang kuat. Berdasarkan hal tersebut maka sumpah pemuda yang salah satunya juga dicetuskan oleh Soekarno selalu mengingatkan kita akan pentingnya persatuan dalam keberagaman agar solidaritas bangsa Indonesia bisa utuh terlebih ketika negara kita menghadapi gangguan dari luar.

Berdasarkan paparan diatas dapat diketahui bahwa konsep persatuan menurut Soekarno yang menginginkan masyarakat yang memiliki solidaritas tentu telah sesuai dengan teori kewarganegaraan republikan yang ada. Kewarganegaraan republikan menginginkan terbentuknya suatu masyarakat yang solid dalam suatu kelompok sehingga dapat menjalin ikatan antar individu dalam suatu komunitas. Pada teori kewarganegaraan republikan terdapat pembatasan hak individu untuk menghindari dominasi kekuasaan maupun diskriminasi yang bisa saja terjadi. Oleh karena itu, Bohman dalam Mahpudin (2023) mengatakan bahwa teori kewarganegaraan republikan menginginkan terbentuknya keteraturan agar dapat tercipta kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik. Implikasinya dari hal tersebut yaitu negara harus berperan optimal serta warga negara harus berpartisipasi demi terwujudnya keteraturan.

## SIMPULAN

Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa dalam menyampaikan berbagai pidatonya pada masa kemerdekaan, Soekarno yang dijuluki macan podium juga dapat dikatakan sebagai tokoh yang memiliki jiwa seorang tokoh republikan dan komunitarian demi memperjuangkan kemerdekaan negara dan persatuan bangsa.

Perspektif Soekarno dalam kaitannya dengan teori kewarganegaraan republikan dapat dilihat pada saat Soekarno menyampaikan konsep negara pada saat melakukan sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni Tahun 1945 sedangkan konsep nasionalisme menurut perspektif Soekarno dalam kaitannya dengan teori kewarganegaraan republikan pada saat Soekarno mengatakan bahwa sosionasionalisme tersebut merupakan nasionalisme Indonesia yang berbeda dengan nasionalisme Eropa.

Perspektif pemikiran Soekarno dalam kaitannya dengan teori kewarganegaraan komunitarian dapat dilihat pada saat Soekarno memaparkan konsep marhaenisme ketika konferensi di kota Mataram. Selain itu, Soekarno juga mempunyai konsep persatuan dalam kaitannya dengan teori kewarganegaraan republikan seperti pada saat sumpah pemuda yang salah satu tokohnya adalah Soekarno yang selalu mengingatkan kita akan pentingnya persatuan dalam keberagaman agar solidaritas bangsa Indonesia bisa utuh terlebih ketika negara kita menghadapi gangguan dari luar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Danardono, D. (2021). Pancasila Sebagai Kisah. *Jurnal Hukum, Politik Dan Kekuasaan*, 1(2), 88. <https://doi.org/10.24167/jhpk.v1i2.346>
- Effendi, W. R. (2018). KONSEPSI Kewarganegaraan Dalam Perspektif Tradisi Liberal Dan Republikan Winda. *Jurnal Trias Politica*, 2(1).
- Hasanah, U., & Aan Budianto. (2020). Pemikiran Soekarno Dalam Perumusan Pancasila. *Jurnal Candi*, Vol. 20 (No. 2), 31–54. <https://jurnal.uns.ac.id/candi/article/view/44780/28324>
- Hidayat, A. (2018). Indonesia Negara Berketuhanan. *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, 1–8. [https://www.mkri.id/public/content/info\\_umum/ artikel/pdf/artikel\\_14\\_02\\_arie hid ayat.pdf](https://www.mkri.id/public/content/info_umum/ artikel/pdf/artikel_14_02_arie hid ayat.pdf)
- Mahpudin, M. (2023). Kewarganegaraan yang Dimediasi: Kemunculan Broker Perempuan dalam Menyediakan Akses ke Layanan Publik. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 9(1), 92–103. <https://doi.org/10.23887>
- Mania, S. (2019). *Metodologi Penelitian*. Pustaka Almaida.
- Mulyawan, Rico, Dewi, D. A., & Furnamasari, Y. F. (2021). Menjaga Persatuan dan Kesatuan di Tengah Pluralitas Masyarakat Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 9016–9020.
- Nurvenayanti, I. (2016). Teori-Teori Kewarganegaraan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 2, 101–108.
- Octavian, W. A., & Dianti, P. (2023). Nasionalisme dan Pancasila Perspektif Sukarno. *Journal on Education*, 5(3), 7553–7562. <https://doi.org/10.314/joe.v5i3.1512>
- Saputri, M. O., & Nuryono, W. (2018). Studi Kepustakaan Konseling Rational Emotive Behavior Therapy Untuk Mengurangi Kecanduan Game Online. *Ejournal.Unesa.Ac.Id*, 801–817.
- Shachar, Ay. (2017). *The Oxford Of Citizenship*. Oxford University Press.
- Soekarno. (2015). *Nasionalisme Islamisme Marxisme*. Segar Arsy.
- Soemohadiwidjojo, R. (2017). *Bung Karno Sang Singa Podium*. Second Hope.
- Zed, M. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.